

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak Krisis Moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 dan telah berkembang menjadi krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional relatif masih rendah, yang mengakibatkan masalah-masalah sosial mendasar belum dapat dipecahkan. Permasalahan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi dimensi. Kegagalan dalam proses penanggulangan kemiskinan dan pengangguran terjadi akibat kurang pemahaman atas penyebab kemiskinan itu sendiri. Pada tahun 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 9,5 juta jiwa atau 9,5 persen dan setiap tahunnya jumlah angkatan kerja baru bertambah sekitar 2,5 juta orang sehingga pada tahun 2006 jumlah pengangguran semakin bertambah menjadi 10,9 juta atau 10,3% dari angkatan kerja yang ada. Demikian juga halnya masalah kemiskinan, jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 sebesar 16,6% atau sekitar 36,1 juta jiwa dan telah bertambah menjadi 39,05 juta atau 17,75% pada tahun 2006<sup>1</sup>.

Dalam hal ini akar kemiskinan diidentifikasi karena terbatasnya akses kesempatan bekerja. Dari akar permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi, akan menambah jumlah pengangguran serta kemiskinan di Indonesia semakin bertambah. Di era otonomi daerah ini daerah harus memainkan perannya yang lebih signifikan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan

---

<sup>1</sup> Wayan Dipta `Strategi Penguatan usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan pola CSR.` [http://www.smecda.com/deputi7/file\\_Infokop/EDISI%2030/5\\_Strategi\\_Penguatan\\_Pdf](http://www.smecda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2030/5_Strategi_Penguatan_Pdf). Diakses 5 Oktober 2014

membentuk kemandirian lokal. Bila megacu pada konsepsi kemandirian lokal, maka peningkatan taraf hidup bangsa untuk menuju Indonesia mandiri akan bisa direalisasikan. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap mempertahankan potensi-potensi lokal agar bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Ketika konsepsi kemandirian lokal bisa menjamin pertumbuhan dan pengembangan pembangunan nasional utamanya untuk mengatasi pengangguran serta kemiskinan, tentu cita-cita luhur bangsa untuk memberdayakan masyarakat kecil bukan persoalan yang sulit dilakukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka proses pembangunan ke depan diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat secara luas yang berdasarkan pada semangat kekayaan, kemartabatan, dan kemandirian. Dalam kaitan ini, upaya pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah menjadi sangat penting dalam mengusung proses perubahan ke depan, khususnya dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Pemerintahan Indonesia bersatu sepakat akan berusaha untuk menurunkan tingkat pengangguran menjadi 5,1% dan tingkat penduduk menjadi 8,2% pada tahun 2009. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sedangkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, maka orientasi pembangunan akan ditujukan kepada revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan serta pengembangan sektor riil, khususnya koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid

Pemberdayaan adalah tugas yang diemban oleh pemerintah, pemberdayaan dilakukan untuk mengangkat serta memberi dukungan kepada masyarakat secara nyata agar mereka memiliki kemampuan untuk mengaktualisasi potensi-nya. Dengan basis kemandirian lokal serta adanya pemberdayaan dari pemerintah, maka diharapkan terjadi sinergi yang positif dan berkesinambungan untuk keluar dari gejolak-gejolak sosial tersebut. Dalam konteks ini penting sekali untuk menekankan kepada masyarakat bahwa pengembangan kewirausahaan yang berbasis pada kemandirian lokal perlu dikembangkan, karena hal tersebut akan tercipta lapangan pekerjaan untuk mereka, serta mengembangkan inovasi-inovasi mereka untuk secara mandiri berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya. Pengembangan kewirausahaan untuk mewujudkan kemandirian lokal tersebut bisa diupayakan dalam bentuk usaha kecil dan menengah(UKM). Kemandirian lokal, melalui pengembangan produk unggulan dan pengembangan UKM saat ini dapat menjadi strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi daerah karena dari produk unggulam tersebut mampu mengangkat martabat suatu daerah yang berdampak pada sumber keuangan daerah.<sup>3</sup>

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tujuan pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

---

<sup>3</sup> Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol 2, No.1, Hal 95-101

3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>4</sup>

Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemilihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Peranan penting UKM dalam perkembangan pembangunan nasional dapat dilihat dari tabel mengenai kontribusi usaha kecil menengah terhadap Produk Domestik Bruto.

TABEL I.1

**Kontribusi Sektor Usaha Terhadap Perkembangan Nilai Produk Domestik Bruto(PDB)**

No	Skala Usaha	Jumlah		Perkembangan	
		2006	2007	Jumlah	%
1	usaha kecil (UK)	1.253.355,60	1.496.254,20	242.898,60	19,38
2	usaha menengah (UM)	532.862,7	625.055,40	92.192,7	17,3
	usaha kecil dan menengah (UKM)	1.768.218,3	2.121.309,6	335.031,2	18,76
3	usaha besar (UB)	1.553.261,30	1.836.094,30	282.833,00	18,21
	<b>Jumlah</b>	<b>3.339.479</b>	<b>3.957.403,90</b>	<b>617.924,3</b>	<b>18,50</b>

*Sumber : BPS Jatim 2008 (data diolah)*

<sup>4</sup> Undang undang nomor 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

Dari tabel I.1 diatas dapat dilihat bahwa sektor industri baik yang kecil maupun menengah memberikan kontribusi yang cukup besar, dari tahun 2006 sampai tahun 2007 berhasil memberikan kontribusi sebesar 18,5% terhadap Produk Domestik Bruto secara Nasional.

Usaha Miro adalah usaha produktif milik perseorangan atau badan usaha milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang undang dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50jt tidak termasuk tempat dan bangunan usaha.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, dengan kekayaan bersih 50jt-500jt tidak termasuk tempat dan bangunan usaha.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebanyak 500jt-10Milyar tidak termasuk tempat dan bangunan usaha sebagaimana yan diatur dalam undang undang.

Usaha Kecil Menengah atau UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200jt tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dan belum terdaftar di badan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dikukuhkan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahun lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan jumlah kekayaan lebih dari 10 Milyar tidak termasuk tempat dan bangunan usaha yang ditempati.<sup>5</sup>

Pentingnya keberadaan UKM di negara berkembang, yaitu pertama karena kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal melahirkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagian bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas daripada usaha besar. Lebih lanjut, usaha kecil dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha, dan mendukung pendapatan rumah tangga.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang undang no 20 tahun 2008 tentang pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah

<sup>6</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18003/5/Chapter%20I.pdf> (diakses 10 Oktober 2014)

**TABEL I.2**  
**Perkembangan Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja**  
**Tahun 2006 – 2007 (menurut skala)**

No	Skala Usaha	Jumlah		Perkembangan	
		2006	2007	Jumlah	%
1	usaha mikro	75.453.589	77.061.669	1.608.080	2.13
2	usaha kecil (UK)	9.599.480	9.970.644	371.164	3.87
3	usaha menengah (UM)	4.494.693	4.720.005	225.312	5.01
	usaha kecil dan menengah (UMKM)	89.547.762	91.752.318	2.204.556	2.46
4	usaha besar (UB)	2.445.595	2.520.707	75.112	3
	Jumlah	91.993.57	94.273.025	75.112	3

*Sumber : BPS Jatim 2008(data diolah)*

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama tahun 2006-2007 sektor usaha mikro, kecil dan menengah mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dari pada usaha besar yakni untuk usaha mikro mencapai 2,13% , usaha kecil 3,87%, usaha menengah 5,01% , dan usaha kecil menengah 2,46% jauh lebih besar dari usaha besar yang hanya mencapai 3,07%

Kekhawatiran sementara kalangan (terutama para penganut ekonomi pasar) terhadap kemampuan UKM dalam menghadapi era globalisasi yang berorientasi pada mekanisme pasar bebas, memang cukup beralasan jika menilai kemampuan UKM hanya dari aspek efisiensi. Sesungguhnya bila diamati secara lebih cermat, memang efisiensi merupakan unsur paling penting dalam mengembangkan kemampuan pemasaran, tetapi banyak unsur lainnya yang lebih dominan baik berupa kemampuan komparatif UKM dalam pasar yang dibangun dari sifat alami UKM, maupun dari sifat pasar yang dalam era globalisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengembangkan informasi.

Sifat spesifik UKM yang sangat potensial dalam menghadapi pasar bebas antara lain, 1) UKM tidak banyak memerlukan modal dan perputaran modalnya relatif cepat, 2) UKM mampu bertahan menghadapi perekonomian dunia karena banyak menggunakan bahan baku lokal, 3) menggunakan teknologi sederhana sehingga tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi, sebaliknya banyak menyerap tenaga kerja. Keberhasilan UKM untuk mengelimir masalah masalah yang berkaitan dengan perubahan perekonomian dunia telah dibuktikan dalam masa resesi perekonomian nasional beberapa tahun yang lalu. Demikian pula kemampuan efisiensi UKM yang bersandar pada sumberdaya lokal (sumber daya alam dan SDM) telah membuktikan kemampuan UKM yang tetap dapat eksis dalam kondisi perekonomian yang paling sulit sekalipun.

Disamping berbagai keunggulan yang dimiliki. UKM juga menghadapi berbagai masalah, antara lain kesulitan akses terhadap a) sumberdaya-sumberdaya produktif, informasi dan pasar. Kelemahan UKM dari aspek pemasaran yang sekarang banyak terlihat terutama untuk produk-produk UKM yang tergolong dalam kelompok barang keperluan sekunder dan tersier. Walaupun demikian nampaknya kendala tersebut belum menjadi penghambat yang potensial untuk lebih memperkuat kedudukan dan peran UKM dalam sistem perekonomian nasional.

Kesulitan UKM dalam membangun akses pasar lebih disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang belum dapat dieliminasi terutama yang berkaitan dengan informasi. Tetapi kendala tersebut bukanlah harga mati, karena banyak variabel-variabel pemasaran produk UKM yang dapat diandalkan seperti

rendahnya harga jual produk UKM yang menjadi daya tarik bagi sebagian kalangan di pasar internasional. Rendahnya eksistensi UKM dalam penguasaan pasar memang lebih terlihat sebagai dampak dari kondisi pasar yang tidak kondusif, namun sesungguhnya kondisi pasar yang demikian merupakan indikator dari adanya masalah pokok yang tidak terlihat secara nyata, yaitu sistem pemasaran yang dikuasai oleh komponen sistem yang lebih kuat, sehingga UKM selalu hanya berperan sebagai *Price Taker* (penerima harga). Dengan mengembangkan kemampuan menangkap informasi, maka diharapkan dominasi komponen lainnya (para pedagang besar dan eksportir) yang memiliki bargaining lebih kuat, yang selama ini berperan sebagai *price maker* (pembuat harga) akan dipatahkan.

Dalam perkembangannya, usaha kecil dan menengah juga memiliki permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi penghambat dalam perkembangannya. Beberapa hal yang menjadi permasalahan UKM di Indonesia diantaranya aspek pemasaran, teknologi, informasi, produksi dan kualitas SDM, serta akses permodalan. Permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah tersebut tentu saja harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, instansi terkait maupun kalangan perbankan karena hal itu merupakan tanggung jawab bersama. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan dari sektor usaha kecil dan menengah (UKM) tersebut.

Di Indonesia Sendiri keberadaan UKM banyak sekali ragam dan jenisnya dan ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya daerah

setempat, kondisi alam dan geografis daerah, maupun dari pihak pemerintah itu sendiri karena tak jarang banyak hasil produksi dari UKM itu menjadi ciri khas dari daerah itu sendiri. Untuk jenis hasil produksi UKM sendiri ada beberapa produk unggulan yang selama ini menyumbangkan nilai *eksport* yang cukup tinggi.

**TABEL I.3**  
**Produk Unggulan Ekspor UKM**

No	Jenis Produk	Presentase
1	kerajinan tangan dan barang seni	29,71%
2	garmen	23,20%
3	makanan dan minuman	18,84%
4	furnitur	7,98%
5	tas, sandal dan sepatu	7,97%
6	aksesoris	5,07%
7	emas, perak dan mutiara	5,07%
8	alat rumah tangga	2,17%

Sumber : BPS (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa sektor kerajinan dan barang seni memberikan kontribusi yang cukup besar (29,71%) kemudian disusul oleh Garmen (23,20%), Makanan dan minuman (18,84%) diikuti oleh sektor lainnya furnitur, tas, aksesoris dan juga alat rumah tangga.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta koperasi menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat jumlah populasi usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) mencapai 48,9 juta unit usaha atau 99,9 persen dari jumlah unit usaha di Indonesia pada tahun 2006. Pada tahun 2003, presentase jumlah UMKM sebesar 99,9 persen dari seluruh unit usaha, yang terdiri dari usaha menengah sebanyak

62,0 ribu unit usaha atau jumlah usaha kecil sebanyak 42,3 juta unit usaha yang sebagian terbesarnya berupa usaha skala mikro. Pada tahun 2004 jumlah UKM diperkirakan telah melampaui 44 juta unit UKM dan telah menyerap lebih dari 79,0 juta tenaga kerja atau 99,5 persen dari jumlah tenaga kerja pada tahun yang sama. Jumlah tenaga kerja ini meningkat rata-rata sebesar 3,10 persen pertahunnya dari posisi tahun 2000<sup>7</sup>.

Kebijakan pemberdayaan UKM secara umum diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, serta revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional.<sup>8</sup> Ada beberapa alasan mengapa usaha kecil dan menengah UKM perlu diberdayakan:

Pertama adalah karena masih banyak atau sekurang-kurangnya 92% UKM belum akses dengan sumber permodalan. Kedua adalah karena jumlahnya sangat besar. Menurut BPS, jika pengusaha UKM tidak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa. Alasan ketiga, jika UKM diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil yang kemudian berkembang menjadi Usaha menengah. Alasan keempat, menurut hasil penelitian syukur pada tahun 2002 umumnya usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat rata-rata 87,34% dan alasan yang kelima

---

<sup>7</sup> <http://bappenas.go.id/get-file-server-node/5226/>. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Diakses 7 Oktober 2014

<sup>8</sup> <http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6173>. `Pemberdayaan Koperasi Serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.` Diakses 7 Oktober 2014

faktor pendanaan menjadi daya dorong bagi usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha kecil dan bahkan bukannya tidak mungkin untuk terus ke usaha menengah.<sup>9</sup>

Diantara berbagai institusi yang mempunyai program pembinaan UKM adalah pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur., Beberapa skema pembinaan telah pernah diluncurkan oleh pemerintahan setempat, antara lain memberikan kesempatan kepada ukm tertentu mengikuti pameran-pameran dagang, baik didalam maupun luar negeri. Dimanapun tujuan keikutsertaan UKM pada pameran-pameran tersebut agar ukm yang ada di Jawa Timur dapat memanfaatkan peluang transaksi-transaksi dagang dengan pihak lain, baik disini keperluan perluasan pasar (*market share*), maupun penyediaan bahan baku, dan akses-akses lain yang diperlukan.

Usaha kecil menengah yang terdapat di Jawa timur merupakan suatu usaha kecil yang berfungsi sebagai wadah usaha bagi sebagian besar masyarakat yang ada di Jawa timur, selain itu usaha kecil yang ada di jawa timur juga mampu tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memberikan andil besar serta menduduki peran yang sangat strategis dalam perkembangan pembangunan ekonomi yang ada di Propinsi jawa timur. Hal tersebut terlihat pada tabel dibawah ini.

---

<sup>9</sup> <http://didikurniawan.web.id/2009/04/27/pelaksanaan-kebijakan-akses-pembiayaan-bagi-pemberdayaan-umkm/>. `Pelaksanaan Kebijakan akses Pembiayaan bagi Pemberdayaan UKM. Diakses 12 Oktober 2014

**Tabel I.4**  
**Jumlah UKM di Jawa Timur ( berdasarkan sektoral )**

No	KOTA/KAB	SEKTOR-SEKTOR YANG ADA PADA UKM					JUMLAH
		PERTANIAN	PERTAMBANGAN	INDUSTRI&P.OLAHAN	PERDAG	JASA	
1	Surabaya	-	-	11.749	76.624	30.347	116720
2	Gresik	18,466	660	3,298	26,38	17,147	65950
3	Sidoarjo	32,682	1,167	39,366	46,688	30,347	150250
4	jombang	21,84	780	3,9	31,2	20,28	78000
5	mojokerto	14,322	512	2,558	20,48	13,299	51150
6	kota Mojokerto	3,738	134	668	5,34	3,471	13350
7	Bojonegoro	19,824	708	3,54	28,32	18,408	70,8
8	Lamongan	20,412	729	3,645	29,16	18,954	72900
9	Tuban	19,67	703	3,513	28,1	18,265	70250
10	Pamekasan	13,678	489	2,443	19,54	12,701	48850
11	Bangkalan	14,448	531	2,655	21,24	13,806	53100
12	Sampang	14,448	516	2,58	20,64	13,416	51600
13	Sumenep	16,036	573	2,864	22,908	14,89	57720
14	Kediri	22,736	812	4,06	32,48	21,112	81200
15	Kota Kediri	6,04	216	1,079	8,628	5,608	21570
16	Blitar	21,21	758	3,788	30,3	19,695	75750
17	Kota Blitar	3,976	142	710	5,68	3,692	14200
18	Tulungagung	18,598	664	3,321	26,568	17,269	66420
19	Nganjuk	19,67	703	3,513	28,1	18,265	70250
20	Trenggalek	13,51	483	2,413	19,3	12,545	48250
21	Malang	36,988	1,321	6,605	52,48	34,346	132100
22	Kota Malang	14,574	521	2,603	20,82	13,533	52050
23	Pasuruan	23,212	829	4,145	33,16	21,554	82900
24	Kota Pasuruan	4,9	175	875	7000	4,55	17500
25	Kota Probolinggo	5,04	180	900	7,2	4,68	18000
26	Probolinggo	18410	658	3,288	26,32	17,108	65800
27	Lumajang	18,424	658	3,29	26,32	17,108	65800
28	Madiun	13,384	478	2,39	19,12	12,428	47800
29	Kota Madiun	13,384	478	2,39	19,12	12,428	47800
30	Ponorogo	14728	526	2,63	21,24	13,676	52,6
31	Pacitan	11,312	404	2,02	16,16	10,504	40400
32	Ngawi	16,884	603	3,015	24,12	15,678	60300
33	Magetan	13860	495	2475	19800	12870	49500
34	Bondowoso	13,622	487	2,433	19,46	12,469	48,65
35	Banyuwangi	27,72	990	4,95	39,6	25,74	99000
36	Situbondo	12,138	434	2,168	17,34	11,271	43350
37	Jember	33,194	1,186	5,928	47,42	30,823	118550
38	Kota Batu	8,266	295	1,476	11,808	7,675	29,52
	JUMLAH	607.533	21.702	130.530	942.530	617.731	2320000

Sumber : BPS Jawa Timur ( Data diolah )

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah UKM yang ada di 40 Kota/Kabupaten yang terdapat di Jawa Timur sudah bisa dikatakan hampir mengalami pemerataan di setiap sektoralnya, hal ini terlihat dengan sektor-sektor yang sudah terjumlah UKM diantaranya adalah, sektor pertanian, pertambangan, industri dan pengolahan, perdagangan, serta jasa. Dengan jumlah masing masing sektor tersebut, sebesar 607.533 unit usaha untuk industri dan pengolahan, 942.530 unit usaha untuk perdagangan, serta 617.731 unit usaha untuk sektor jasa.

**Tabel I.5**  
**Struktur Perekonomian Provinsi Jawa Timur 2012**

NO	LAPANGAN USAHA	PRESENTASE(%)
1	Pertanian	15.42
2	Pertambangan dan Penggalian	2.08
3	Industri Pengolahan	27.11
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1.35
5	Konstruksi	4.55
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	30.40
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.70
8	Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan	5.05
9	Jasa-Jasa	8.35

Sumber : BPS Jawa Timur

Tiga Sektor yang paling mendominasi pembentukan ekonomi provinsi Jawa Timur adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran (30,40%), sektor industri pengolahan (27,11%) dan sektor pertanian (15,42%). Ketiga sektor tersebut menyumbang 72,93 % dari perekonomian Jawa Timur.

Dimana pada jumlah masing-masing sektor tersebut menunjukkan bahwa jumlah UKM yang paling banyak terdapat pada sektor perdagangan, dengan melihat pemaparan diatas cukup terlihat bahwa UKM yang ada di Jawa timur bisa dikatakan merupakan suatu jenis usaha yang mempunyai potensi/peluang besar

untuk menjadi suatu bentuk usaha yang maju dengan produk-produknya yang berkualitas dan harga yang dapat bersaing(murah), serta mampu menjadi penopang keberlangsungan perekonomian masyarakat, khususnya golongan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Sebab UKM merupakan suatu jenis usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi permasalahan pengangguran yang semakin tinggi dalam masyarakat.

Melihat betapa pentingnya peranan UKM di Jawa Timur maka evaluasi terhadap kinerja UKM peserta pameran yang ada di Jawa Timur menjadi hal yang sangat penting, terutama sebagai suatu parameter tolak ukur untuk mengetahui apakah dengan diadakannya pameran sangat berpengaruh terhadap UKM baik pada skala ekonomi, permodalan yang dimiliki maupun bahan baku yang tersedia. Sehingga mampu mendapat respon dari mitra dagang baik yang ditemuinya selama pameran berlangsung maupun mitra dagang usaha secara simultan. Dalam arti UKM dapat memenuhi pesanan permintaan baik dalam skala domestik maupun skala luar negeri, yang secara tidak langsung akan berdampak pada tingkat perkembangan serta keberlangsungan UKM di Jawa Timur.

Untuk itu peran pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam melakukan evaluasi kinerja serta mengetahui skala produksi UKM yang ada di Jawa Timur sangatlah diharapkan guna sebagai bentuk kepedulian pemerintah setempat dalam memelihara, mendukung, serta memberikan harapan terhadap bisnis UKM, khususnya pada tingkat skala ekonomi, dan permodalan yang dimiliki, maupun pada sumber daya yang tersedia. Demi keberlangsungan bisnis UKM di Jawa timur.

Dari jumlah penyebaran usaha UKM yang terdapat pada sektor perdagangan, bisa terlihat bahwa jumlah penyebaran UKM di Surabaya cukup banyak. Hal ini membuktikan bahwa kota Surabaya mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup potensial dan sebagai barometer untuk kawasan Jawa timur khususnya, dan Indonesia Timur. Selain itu juga mempunyai peran yang cukup penting dan diperhitungkan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan propinsi Jawa Timur. Kekuatan ekonomi dengan segala aktivitas ekonomi yang ada, merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Jawa Timur serta memberikan kontribusi yang paling besar dari 38 kabupaten di Jawa Timur.<sup>10</sup>

Akan tetapi kota Surabaya juga memiliki permasalahan mendasar yang belum dapat dipecahkan yaitu masalah kemiskinan. Hal itu dibuktikan masih terdapat kantong-kantong kemiskinan (kawasan kumuh) di Surabaya.<sup>11</sup> Berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh tim penyusun RT/RW kota Surabaya tahun 2004. Kelurahan-kelurahan yang memiliki kawasan kumuh ada 23 buah yaitu: Ujung, Bulak Banteng, Wonokusumo, Sidotopo, Gebang, Medokan Semampir, Keputih, Gununganyar, Rungkut Menanggal, Wiyung, Waru, Benowo, Moro Krembangan, Romo kalisari, Suberejo, Sememi, dan Kandangan.<sup>12</sup> Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disebutkan oleh Wawan Indarto (Kasubid Kesra Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya):

<sup>10</sup> <http://endahgf.blogspot.com/2007/09/belajar-melihat-potensi-wilayah-dengan.html>. `Sekilas tentang Surabaya`. Diakses 15 Oktober 2014

<sup>11</sup> Andarita Rolasisasi. [http://Pemberdayaan-masyarakat-suwoto.blogspot.com/2009\\_02\\_01\\_archive.html](http://Pemberdayaan-masyarakat-suwoto.blogspot.com/2009_02_01_archive.html). Pemberdayaan Masyarakat guna Mengurangi Kemiskinan Perkotaan. Diakses 20 Oktober 2014

<sup>12</sup> Andarita Rolasisasi. [http://Pemberdayaan-masyarakat-suwoto.blogspot.com/2009\\_02\\_01\\_archive.html](http://Pemberdayaan-masyarakat-suwoto.blogspot.com/2009_02_01_archive.html). Pemberdayaan Masyarakat guna Mengurangi Kemiskinan Perkotaan. Diakses 20 Oktober 2014

Secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 35,1 juta atau 15,97% pada 2005, angka ini baik di 2006 menjadi 39,3 juta (17,75%). Pada data maret 2007, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 37,17 juta atau 16,58%. Sementara di Surabaya menunjukkan sebaliknya penduduk miskin malah meningkat. Berdasarkan data Bappemas (Badan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat) Surabaya, tahun 2001 jumlah penduduk miskin (ber-KTP Surabaya) hanya 80kk atau 296,493 jiwa. Tahun 2005 naik jadi 106.116 KK atau 424.484 jiwa 2007 menjadi 126.744 KK atau 431.331 jiwa.<sup>13</sup>

Kota Surabaya memiliki potensi unggulan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Potensi unggulan yang dimiliki kota Surabaya merupakan produk yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).<sup>14</sup> Usaha ini bukan hanya berfungsi dalam penyerapan tenaga kerja, namun terbukti sebagai suatu bentuk kegiatan usaha yang memiliki fleksibilitas dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa produk unggulan yang ada antara lain makanan dan minuman, pakaian jadi, kerajinan tangan dan olahan hasil laut.

---

<sup>13</sup> Noer

<http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota/?id=055c757512ad33aafb498ea640acce4e20085906>

9. `Tren Kemiskinan di Surabaya semakin Meningkat. Diakses 10 oktober 2014

<sup>14</sup> <http://www.damandiri.or.id/file/sitiumajahmasjkuriunairbab5.pdf>. "Kondisi Geografis Kota Surabaya". Diakses 10 Oktober 2014

**Tabel I.6****Produk Domestik Regional Bruto Kota Surabaya Tahun 2011**

NO	LAPANGAN USAHA	Presentase(%)
1	Pertanian	0.27
2	Pertambangan dan Penggalian	0.02
3	Industri Pengolahan	18.85
4	Listrik, Gas dan Air bersih	0.00
5	Konstruksi	5.18
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	58.21
7	Angkutan dan Komunikasi	6.51
8	Keuangan, Jasa Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.80
9	Jasa-jasa	7.17
<b>TOTAL PDRB UKM</b>		<b>100.00</b>

Sumber : Bps Jatim ( data diolah)

Sektor Perdagangan di kota Surabaya mencapai 58,21 persen, sektor industri pengolahan (18,85%), Jasa-jasa(7,17%), Angkutan dan Komunikasi (6.51%). Data diatas menunjukkan bahwa perekonomian di kota surabaya sangat mendominasi kestabilan pembentukan ekonomi di kota Surabaya.

Sektor Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang baru maupun bekas, yang meliputi penjualan sepeda motor dan mobil, perdagangan besar dalam negeri, perdagangan ekspor dan perdagangan impor. Barang-barang yang diperdagangkan meliputi barang dari produksi domestik maupun berasal dari impor. Termasuk juga kegiatan perdagangan yang sifatnya hanya agen perantara suatu perusahaan yaitu pendapatannya berupa komisi.

Banyaknya perdagangan di kota surabaya telah menjadi suatu peningkatan pada perekonomian kota Surabaya. Kenyataan tersebut mengungkapkan bahwa Kota Surabaya merupakan kota yang menjadi pusat perdagangan di wilayah

Provinsi Jawa Timur. Menurut tabel I.3 salah satunya adalah Usaha Kecil Menengah Kerajinan tangan (Handycraft) yang merupakan produk yang paling diminati oleh warga Surabaya.

Tabel I.7

## Daftar Usaha Kecil Menengah Binaan Disperindag Kota Surabaya

No	NAMA	ALAMAT	NO. KTP	KOMUNITAS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Soekasih	Jl. Sumbermulyo V / 32	12.5613.700656.0115	Jahit	Gundih	Bubutan
2	Sholichatus S	Jl. Sumbermulyo V / 22	3578135404690002	Jahit	Gundih	Bubutan
3	Arys P. Irawati	Jl. Babatan 14	3578265004720004	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
4	Sutirah	Jl. Babatan Masjid 25	3278264907700002	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
5	Herrisky	Jl. Babatan Gg. Masjid 23	35782641068400002	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
6	Rubinah	Jl. Babatan Gg. Masjid 35	3578264202678002	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
7	Aliyah	Jl. Babatan Gg. Masjid 24	3578266407690002	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
8	Her Nanik	Jl. Babatan Gg. Masjid 23	3578266301650003	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
9	Siti Aminah	Jl. Wonosari Wetan II / 12	3578167107610001	Jahit	Wonokusumo	Semampir
10	Hartati S	Jl. Wonosari Wetan XII / 4	3578165607480001	Jahit	Wonokusumo	Semampir
11	Sripuk	Jl. Wonosari Wetan 8 / 31	3578167006530301	Jahit	Wonokusumo	Semampir
12	Surati	Jl. Wonosari Wetan XII	3578164207690004	Jahit	Wonokusumo	Semampir
13	Sumining	Jl. Wonosari Wetan XII A / 5	3578167006440042	Jahit	Wonokusumo	Semampir
14	Iva Nursiawati	Jl. Wonosari Wetan II / 5	3578174702720003	Jahit	Kapasari	Genteng
15	Endang Sri Lestari	Jl. Wonosari Wetan 4 / 17	3576075601610001	Jahit	Kapasari	Genteng
16	Ning Siamah	Jl. Wonosari Wetan I / 36	3578166812850001	Jahit	Wonokusumo	Semampir
17	Maslachah	Jl. Peneleh 2 / 29	3578075705590001	Jahit	Peneleh	Genteng
18	Inda Wati	Jl. Ngaglik Baru 2 / 17	12.5611.660370.0001	Jahit	Kapasari	Genteng
19	Masidah	Jl. Ngaglik Baru 2 / 7	3578075609620001	Jahit	Kapasari	Genteng
20	Suwarni	Jl. Ngaglik Baru 6 / 7	3578074402560002	Jahit	Kapasari	Genteng
21	Suhariastuti	Jl. Undaan Peneleh 3 / 2-4	3578075011680004	Jahit	Peneleh	Genteng
22	Mudji Lestari	Jl. Babatan 14	3578266107670001	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
23	Mutmainah	Jl. Sutorejo 230	3578265011690003	Jahit	Dukuh Sutorejo	Mulyorejo
24	Siti Sundari	Jl. Gresik 39	3578156407610002	Jahit	Morokreban gan	Krebangan
25	Pariyam	Jl. Gresik 39	3578155307700002	Jahit	Morokreban gan	Krebangan
26	Sutjiati	Pandegiling 5 no 18c	3578084401650004	Handycraft	Wonorejo	Tegalsari
27	Sri Sulatiningsih	Kedungsari 21c	3578134505520003	Handycraft	Wonorejo	Tegalsari
28	Nani Suwarni	Krebangan Bhakti 13 / 31	3578154212600002	Handycraft	Krebangan	Krebangan
29	Rita Erwinanti	Krebangan Bhakti XI / 21	3578157107650003	Handycraft	Krebangan	Krebangan
30	Hasnali	Krebangan Bhakti 12 / 41	3578154505570003	Handycraft	Krebangan	Krebangan

31	Hj. Siti Munawaroh	Kreimbangan Bhakti X / 6	3578155703680004	Handycraft	Kreimbangan	Kreimbangan
32	Rosidah	Kreimbangan Jaya Utara 7 / 22	3578156404770003	Handycraft	Kreimbangan	Kreimbangan
33	Endang Sulistiyowati	Gubeng Kertajaya VI D / 9D	3578085410630002	Handycraft	Kertajaya	Gubeng
34	Nining SP	Gubeng Kertajaya 4B / 6	3578086507620001	Handycraft	Gubeng	Gubeng
35	Endang Sunarti	Gubeng Kertajaya 4 D / 25	3578084301680002	Handycraft	Gubeng	Gubeng
36	Mu' Anah	Gubeng Kertajaya 4 D / 25B	3578085508690004	Handycraft	Gubeng	Gubeng
37	Aminah	Juwingan 79 D	12.5619.690655.002 4	Handycraft	Gubeng	Gubeng
38	Djaenab	Juwingan 77 A	3578087412570002	Handycraft	Gubeng	Gubeng
39	Yulianawati	Keputran Panjunan 3 / 30	3578075607590001	Handycraft	Genteng	Genteng
40	Ita Susanti	Keputran Kejambon 2 / 73	3578074307680001	Handycraft	Genteng	Genteng
41	Endang Inanti	Keputran Panjunan 4 / 28	3578074408620002	Handycraft	Genteng	Genteng
42	Siti Solicha	Keputran Kejambon 2 / 73	'357807481274000 2	Handycraft	Embong Kaliasin	Genteng
43	Asiyah	Keputran Panjunan 4 / 15B	357807600863000 1	Handycraft	Embong Kaliasin	Genteng
44	Soenarti	Tembok Dukuh XI / 6	357813700650013 8	Handycraft	Gundih	Bubutan
45	Sriatun	Margorukun Tengah 19	357813450955000 1	Handycraft	Gundih	Bubutan
46	Sugihartini	Tembok Dukuh XI / 3	357813631260000 1	Handycraft	Gundih	Bubutan
47	Siswarni	Demak Timur 19-A	357813420676000 3	Handycraft	Gundih	Bubutan
48	Mamik Sunami	Tembok Dukuh XII / 8C	357813571252000 1	Handycraft	Gundih	Bubutan
49	Erna Wijaya	Demak Timur 19-D	357813550073000 1	Handycraft	Gundih	Bubutan
50	Arba'atun	Tambak Asri Tanjung 5 / 4	35781563106500013	Kue Basah	Morokreimbangan	Kreimbangan
51	Eni Suyanti	Tambak Asri Tanjung I / 40	3578156009730002	Kue Basah	Morokreimbangan	Kreimbangan
52	Ruhayati	Tambak Asri Mawar 18	3578154603730001	Kue Basah	Morokreimbangan	Kreimbangan
53	Tri Setiowati	Tambak Asri Mawar 18	3578155303800004	Kue Basah	Morokreimbangan	Kreimbangan
54	Dwi Budi Lestyawati	Ngaglik Kuburan 19	3578075505730006	Kue Basah	Kapasari	Genteng
55	Ramini Al Sukini	Kapasari 10 / 5	3578074705640001	Kue Basah	Kapasari	Genteng
56	Suprapti	Kapasari 9 Dka / 50	3578075909650004	Kue Basah	Kapasari	Genteng
57	Sutiamah	Kapasari 9 Dka / 72	3578076311660003	Kue Basah	Kapasari	Genteng
58	Soemarlik	Kapasari 5 / 32	3578074907520001	Kue Basah	Kapasari	Genteng
59	Monah	Kapasari IX Dka / 14	12.5611.430862.000 2	Kue Basah	Kapasari	Genteng
60	Susiati	Gembong II / 36	3578075607550001	Kue Basah	Kapasari	Genteng
61	Lilik Sunarti	Gembong II / 51	3578075002640001	Kue Basah	Kapasari	Genteng
62	Toety Kirmiawati	Dharmawangsa V / 26	12.5619.690572.001 6	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
63	Henny Indarti	Dharmawangsa V / 19	3578085501650001	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
64	Soemani	Dharmawangsa Barat 27	3578086009690002	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
65	Hartatik	Dharmawangsa Barat 25	3578084506800003	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
66	Koesrini	Kapasari IV / 23-II	3578076006500001	Kue Basah	Kapasari	Genteng
67	Purweni	Kapasari 2 / 17	3578077112630002	Kue Basah	Kapasari	Genteng
68	Widartingsih	Kapasari 5 / 24	3578074104570002	Kue Basah	Kapasari	Genteng
69	Rini Poeryanti	Dharmawangsa Barat 29	35788085704700007	Kue Basah	Airlangga	Gubeng

## ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

70	Sri Lestari	Dharmawangsa 7 / 23	3578084110780003	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
71	SRI Rahayu Hidayat	Gubeng Airlangga 4 / 15 BLK	3578086409750003	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
72	Sumarmi	Dupak Bangusari 7 / 38A	3578157105670003	Kue Basah	Dupak	Krembangan
73	Katiam	Dupak Bangusari 8 / 34	3578155606550003	Kue Basah	Dupak	Krembangan
74	Sumiyah	Dupak Bangusari 8 / 11	3578155004700002	Kue Basah	Dupak	Krembangan
75	Agustini R	Dupak Bangusari 7 / 24	3578155808810002	Kue Basah	Dupak	Krembangan
76	Sudarmi	Dupak Bangusari 7 / 24	3578156603570002	Kue Basah	Dupak	Krembangan
77	Suparmi	Dupak Bangusari 7	3578157006500113	Kue Basah	Dupak	Krembangan
78	Miniarti	Dupak Bangusari 8 / 6	3578154702600004	Kue Basah	Dupak	Krembangan
79	Ika Sucihayati	Dupak Bangu Rejo 46	3578154309800001	Kue Basah	Dupak	Krembangan
80	Suyanti	Dupak Bangusari 7 / 38	3578154109770003	Kue Basah	Dupak	Krembangan
81	Sulikhah	Dupak Bangusari 7 / 10	3578155506590004	Kue Basah	Dupak	Krembangan
82	Siti Rahayu	Gubeng Airlangga IV / 49	3578086903620003	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
83	Anik Sulistijani	Gubeng Airlangga VII / 84	12.5619.640267.000 2	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
84	Sri Wigati	Gubeng Airlangga IV / 56	3578084810660002	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
85	Dyah Adjeng W	Gubeng Airlangga 6 / 15A	3578086802620002	Kue Basah	Airlangga	Gubeng
86	Yani S Hafizar	Jl. Tapak Siring 1	3578136104680007	Kue Kering	Pacarkeling	Tambaksari
87	Emi	Jl. Pacarkeling I / 37	3578135704730002	Kue Kering	Pacarkeling	Tambaksari
88	Elok R	Jl. Tengger Kandungan XV/10	12.5627.630860.001 2	Kue Kering	Kandungan	Benowo
89	Endang Soegiri	Jl. Ikan Mungsing X / 12	3578154410590003	Kue Kering	Perak Barat	Krembangan
90	Sudarmi	Jl. Karah IV / 74B	3578235209660001	Kue Kering	Karah	Jambangan
91	Sukarmi	Jl. Karah IV / 76B	12.5606.491035.000 1	Kue Kering	Karah	Jambangan
92	Lasinem	Jl. Karah IV / 74	12.5606.520345.000 1	Kue Kering	Karah	Jambangan
93	Paradita Dwi GP	Jl. Karah IV / 74B	3578234910890001	Kue Kering	Karah	Jambangan
94	Muriani	Jl. Karah IV / 74	3578236202740002	Kue Kering	Karah	Jambangan
95	Sulastri	Jl. Karah IV / 74	3578235308760001	Kue Kering	Karah	Jambangan
96	Rohmah	Jl. Kawatan VI / 15	3578136104680007	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
97	Mistin Inayah	Jl. Sulung Sekolahan 1	3578136404750004	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
98	Endang Purwaningsih	Jl. Sulung Sekolahan 1	3578135604750007	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
99	Irma Wiludjeng	Sulung Tengah 3-A	3578134412780004	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
100	Soerti	Jl. Kepatian V / 6	12.5613.680654.000 2	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
101	Laily Fitriyah	Jl. Carikan 4 / 6A	3578135211730003	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
102	Oemi Novena	Jl. Kepatian 6 / 2-C	3578135411640002	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
103	Oemi Noveni	Jl. Kepatian 6 / 2-C	3578135411640004	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
104	Elis Zubaidah	Jl. Kawatan I / 6	3578135704730002	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
105	Saifa Fuana	Jl. Bubutan V / 2	3578137110590001	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
106	Henny Jusuf	Jl. Praban Wetan 3 / 8	3578134309630001	Kue Kering	Alon - alon Contong	Bubutan
107	Mariyati	Jl. Pegirian 204	3578117001680007	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
108	Rusidawati	Jl. Kebon dalem 7 / 54-A	3578115407670002	Kue Kering	Simolawang	Simokerto

109	Watini	Jl. Simolawang 3 / 36	3578117006580134	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
110	Amy Sulistyaningsih	Jl. Simolawang 3 / 11	3578114512730002	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
111	Yulia Afita	Jl. Kenjeran 4C / 33	3578115707710002	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
112	Chomariyah	Jl. Simolawang 3 / 47	3578115403850001	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
113	Zakiah	Jl. Simolawang 3 / 37	3578117006770034	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
114	Sulistiowati	Jl. Simolawang 3 / 47	3578114809780002	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
115	Anik Julastri	Jl. Simolawang 3 / 45	3578115708650004	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
116	Rini Hardjianti	Jl. Kampung Malang Utara 6/4	3578055304680003	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
117	Soewarsih	Jl. Pandegiling Tengah 16	3578054303540001	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
118	Rini W	Jl. Kedondong 29	3578056610730001	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
119	Moesni	Jl. Pandegiling 5 / 18	3578055208520001	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
120	Laily Khumardiyah	Jl. Boto Putih 2 / 8	12.5614.601276.0002	Kue Kering	Simokerto	Simokerto
121	Suwarti	Jl. Pandegiling Tengah 62	3578055704700003	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
122	Surya	Jl. Kampung Malang Utara I/24	3578056209620001	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
123	Siti Isnah	Jl. Pandegiling Tengah 18	3578054101560004	Kue Kering	Tegalsari	Tegalsari
124	Yayuk P	Jl. A.Yani 118 / B-8	3578226811600002	Kue Kering	Ketintang	Gayungan
125	Suidah	Jl. Wonosari Mulyo 8C / 20	3578176106800003	Kue Kering	Wonokusumo	Semampir
126	Maisun	Jl. Kebon Dalem 7 / 54	3527054210850005	Kue Kering	Simolawang	Simokerto
127	Endri S	Jl. Lasem 70	3578155503750002	Jamur	Dupak	Krembangan
128	Suradi	Jl. Lasem 70	3578151406470002	Jamur	Dupak	Krembangan
129	Mujiati	Jl. Kebonsari Tengah 83	3578234812780001	Jamur	Kebonsari	Jambangan
130	Rukayah	Jl. Kebonsari IV / 27	3578234102650002	Jamur	Kebonsari	Jambangan
131	Maryani	Jl. Kebonsari IV / 28	3578234101750002	Jamur	Kebonsari	Jambangan
132	Tuji Parmasi	Jl. Manukan Tirta 23-F / 2	3578140305690004	Jamur	Manukan Kulon	Tandes
133	Sulam Hidayat	Jl. Kebonsari Tengah 89	3578231801530001	Jamur	Kebonsari	Jambangan
134	Ardiwalau Hasan	Jl. Manukan Wasono 10 / 7	3578141201520001	Jamur	Manukan	Tandes
135	Dyah Puji	Jl. Wonorejo Gg.3 / 17	3578145624330001	Jamur	Manukan	Tandes
136	Misdi	Jl. Manukan ranu	3578146234110001	Jamur	Manukan	Tandes
137	Ririn Ardianty	Jl. Manukan Tirta III / 18	3578144305820001	Jamur	Manukan	Tandes
138	Hartatik	Jl. Wonorejo Gg. Makam	35787354511760002	Jamur	Manukan	Tandes
139	Sulistiyani	Jl. Karah V / 21	35785065372340001	Jamur	Karah	Jambangan
140	M. Fadrozi	Jl. Wonorejo Gg II / 1	35788355141760001	Jamur	Manukan	Tandes
141	Erik Santoso	Jl. Pakal Gg D / 1	3578456615160001	Jamur	Pakal	Pakal
142	Ferdi Ansyah	Jl. Manukan Wasono IV / 5	3578245205830001	Jamur	Manukan	Tandes
143	Siti Mudrikah	Jl. Lasem 2 / 4	3578156603770005	Jamur	Dupak	Krembangan
144	Rodatul Jannah	Jl. Lasem II	35786051134570001	Jamur	Dupak	Krembangan
145	Yuliati	Jl. Lasem I / 28-B	3578567978340002	Jamur	Dupak	Krembangan
146	Minartin	Jl. Lasem 49 A	3578156512440003	Jamur	Dupak	Krembangan
147	Lamijan	Jl. Lasem 4 / 11	3578901243200003	Jamur	Dupak	Krembangan
148	Riffah Qomariah	Jl. Lasem 47C	3578713849560002	Jamur	Dupak	Krembangan

149	Sri Purwanti	Jl. Lasem Baru 51	3678265506790002	Jamur	Dupak	Krembangan
150	Kinni A	Jl. Lasem II / 10	3578375618560005	Jamur	Dupak	Krembangan
151	Sulastri	Jl. Lasem I / 28-B	3578156107760002	Jamur	Dupak	Krembangan

Sumber : Disperdagin Kota Surabaya

Kerajinan tangan (Handycraft) telah dianggap sebagai komoditi yang bisa diandalkan di wilayah Kota Surabaya, akan tetapi untuk peningkatan sumber keuangan daerah dalam pengelolaannya masih belum optimal. Hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman pelaku UKM Kerajinan Tangan terhadap permasalahan utama mereka, yaitu masalah aspek pemasaran, teknologi, kualitas SDM, dan permodalan. Hal tersebut mempengaruhi produktivitas mereka yang masih belum memadai mengenai model model yang sedang tren di pasar baik domestik maupun global. Oleh sebab itu perlu adanya peran dari pemerintah khususnya pemerintah daerah kota surabaya untuk memberikan pengembangan usaha secara optimal pada pelaku UKM tersebut. Peran pemerintah daerah yang terkait adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya (Disperindag), karena Disperindag Kota Surabaya mempunyai wewenang yang dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi pelaku UKM Kerajinan Tangan dalam hal memberi jalan atau sebagai distributor produk Kerajinan Tangan (Handycraft). Usaha Pemberdayaan secara berkelanjutan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surabaya sangat penting dilakukan, hal ini mengingat pada upaya untuk menjadikan kerajinan tangan di Surabaya semakin baik dalam pasar global di Indonesia.

Di Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari terdapat kampung binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Surabaya yang telah menjalankan Usaha kecil Menengah di bidang Kerajinan

Tangan (Handycraft). Dalam mengembangkan UKM Kerajinan Tangan (Handycraft) tersebut Disperindag memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari agar masyarakat di wilayah kampung tersebut lebih produktif untuk membuat produk Kerajinan Tangan yang mampu bersaing di pasar global. Karena sampai saat ini masyarakat di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari masih kurang mampu untuk membuat Kerajinan Tangan (Handycraft) yang diminati oleh masyarakat modern pada umumnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat dibuat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

“Bagaimanakah Program Disperindag dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan Handycraft di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dari Kebijakan Disperindag yang berupa program dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kerajinan tangan (Handycraft) di Wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Dapat menjadi bahan perbandingan dalam rangka penelitian dan pengembangan lebih lanjut bagi bidang studi Ilmu Administrasi Negara mengenai

kajian tentang Kebijakan Disperindag dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. Serta diharapkan mampu menambah referensi kepada pihak-pihak yang terkait mengenai hal tersebut.

#### **I.4.2 Manfaat Praktis**

Memberikan gambaran bagi aparat-aparat instansi perindustrian dan perdagangan pemerintah khususnya di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Surabaya maupun komponen masyarakat agar dapat mengetahui program apa saja yang dilakukan Pemerintah Kota (Disperindag) dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah. Melihat hubungannya dengan UKM, terutama untuk memecahkan masalah UKM yang sering terjadi di pasar global.

### **1.5 Tinjauan Teori**

#### **1.5.1 Kebijakan Publik**

Konsep kebijakan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijaksanaan sebagai "*a projected program of goals, values and practices*", (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah).<sup>15</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia mengemukakan bahwa kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dandasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi, dan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Sedangkan menurut Koontz dan O'Donnel

---

<sup>15</sup> Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta, Penerbit Salemba Humanika, 2012) Halaman 6

mengemukakan bahwa kebijakan adalah pernyataan atau pemahaman umum yang mempedomi pemikiran dalam mengambil keputusan yang memiliki sensi batas-batas tertentu dalam pengambilan keputusan.<sup>16</sup>

Definisi yang sering dikutip adalah definisi yang dikemukakan oleh Thomas R.Dye yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.<sup>17</sup>

James Anderson menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi sejumlah masalah atau persoalan. Menurut anderson, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yaitu :

1. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan.
  2. Kebijakan merupakan suatu arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan merupakan keputusan-keputusan sendiri.
- Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menciptakan

---

<sup>16</sup> Wayne Parson, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, (Jakarta, kencana, 2005)

<sup>17</sup> Leo Agustino, *Dasar Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2008)

undang undang mengenal suatu hal tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya.

3. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.

Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.

Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.<sup>18</sup>

Harold D. Laswell mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan nilai-nilai dan praktek yang terarah. David Easton mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu proses pengaplikasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah.<sup>19</sup>

Charles O Jones mengatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan pemerintah atas permasalahan publik yang terkandung beberapa komponen, yaitu antara lain :

1. *Goals* atau sasaran-sasaran yang merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai.

<sup>18</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta, caps, 2012)

<sup>19</sup> Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, (Jakarta, Penerbit Salemba Humanika, 2012) Halaman 6

2. *Plans / proposals* atau rencana proposal yang merupakan spesifikasi alat untuk mencapai tujuan tersebut.
3. *Programmes* atau program-program yang merupakan alat format untuk mencapai tujuan
4. *Decisions* atau keputusan-keputusan yang merupakan spesifikasi tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.<sup>20</sup>

Efek atau dampak sebagai hasil ukur dari pelaksanaan program, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan baik dampak utama ataupun dampak sampingan. Kebijakan dalam permasalahan ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu dan mempunyai batasan kewenangan dan aktor pelaksana kebijakan dalam mengatasi dan menyikapi suatu keadaan tertentu dalam batas wilayah wewenangnya dalam kebijakan dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari Surabaya.

## **1.5.2 Pemberdayaan**

### **1.5.2.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan merupakan upaya memberdayakan (mengembangkan klian dari keadaan dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi, pemberdayaan masyarakat

---

<sup>20</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus, (Yogyakarta, caps, 2012)

adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai/memperoleh kehidupan yang lebih baik.<sup>21</sup>

Payne, mengatakan sebagai berikut :

*“to help clients gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of sosial or personal blocks to exercising cacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environtment to clients.”*

Artinya bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi sosial dalam melakukan tindakan.<sup>22</sup>

Menurut Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people centred, participatory, empowering adn sustainable.”*<sup>23</sup>

Shardlow menjelaskan bahwa pengertian mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengkkontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan ini mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan

<sup>21</sup> [www.id.shvoong.com](http://www.id.shvoong.com)(diakses (tanggal 10 Oktober 2014)

<sup>22</sup> [Ibid\(www.id.shvoong.com\)](http://www.id.shvoong.com) (tanggal 10 Oktober 2014)

<sup>23</sup> [www.suniscome.50webs.com](http://www.suniscome.50webs.com)(tanggal 10 Oktober 2014)

yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain :

**Pertama** : kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagai kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.

**Kedua** : kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.<sup>25</sup>

Pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.<sup>26</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk

<sup>24</sup> [www.id.shvoong.com](http://www.id.shvoong.com)(tanggal 10 Oktober 2014)

<sup>25</sup> [www.suniscome.50webs.com](http://www.suniscome.50webs.com)(tanggal 10 Oktober 2014)

<sup>26</sup> Ibid([www.suniscome.com](http://www.suniscome.com)) (tanggal 10 Oktober 2014)

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Sumodiningrat, secara konkrit pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat. Sementara itu, pembangunan ekonomi rakyat harus diawali dengan usaha pengentasan produk dari kemiskinan. Kemudian Sumodiningrat, mengatakan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu bantuan dana sebagai modal usaha, pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan, penyediaan sarana, pelatihan bagi aparat dan masyarakat seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.<sup>28</sup>

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. *Pertama, enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan

<sup>27</sup> Ibid(www.suniscome.com) (tanggal 10 Oktober 2014)

<sup>28</sup> <http://2framenit.com>(diakses tanggal 10 Oktober 2014)

mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>29</sup>

2. *Kedua, empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan saran dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.<sup>30</sup>

3. *Ketiga, protecting*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi

<sup>29</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) (diakses tanggal 10 Oktober 2014)

<sup>30</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id)(diakses tanggal 10 Oktober 2014)

bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengkerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.<sup>31</sup>

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat. Tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan dari institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan

---

<sup>31</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id)(diakses tanggal 10 Oktober 2014)

masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan. Pembudayaan, pengamalan demokrasi.<sup>32</sup>

Dari berbagai definisi diatas dapat dipahami bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk mengembangkan suatu potensi yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok guna meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mewujudkan hasil yang diinginkan dari suatu pemberdayaan yaitu berupa *output* dan *outcome*. *Output* adalah hasil langsung dari proses pemberdayaan yang dilakukan, sedangkan *outcome* adalah dampak perubahan yang diharapkan setelah adanya pemberdayaan.

#### **I.5.2.2 Proses Pemberdayaan**

Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu proses dapat dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya telah ditentukan jangka waktunya. Namun, ada pula yang melihat pemberdayaan sebagai suatu proses. Sebagai suatu proses pemberdayaan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*). Menurut Hogan, proses pemberdayaan individu sebagai suatu proses yang *relative* terus berjalan sepanjang usia manusia yang diperoleh dari pengalaman individu tersebut dan bukannya suatu proses yang berhenti pada suatu masa saja (*empowering is not an end state, but a process that all human experience*)

---

<sup>32</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id)(diakses tanggal 10 Oktober 2014)

Hogan menggambarkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu :<sup>33</sup>

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan (*recall depowering/empowering experience*)
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment/empowerment*)
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*)
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*)
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementaiskannya (*develop and implement action plans*)

Dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat ini, tentunya tidak terlepas dari peran pelaku pemberdayaan, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Pelaku pemberdayaan ini nantinya yang akan bekerja sebagai *community worker* ataupun *enabler*.

Menurut ife, sebagai *community worker*, ife melihat ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah kepada keterampilan seseorang sebagai *community worker* sebagai pemberdaya masyarakat.

Keempat peran dan keterampilan tersebut adalah :

- 1) Peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*);

---

<sup>33</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) (diakses tanggal 10 Oktober 2014)

- 2) Peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skills*);
- 3) Peran dan keterampilan perwakilan (*representational roles and skills*);
- 4) Peran dan keterampilan teknis (*technical and skills*).<sup>34</sup>

Jadi dalam hal ini, proses pemberdayaan di tujukan guna memperoleh daya untuk menumbuhkan kemandirian melalui sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan merumuskan suatu program yang di dahulukan pelaksanaannya untuk membangun dan membentuk masyarakat yang mandiri.

### **I.5.3 Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

#### **I.5.3.I Pengertian Usaha Kecil dan Menengah (UKM)**

Pengertian industri kecil di Indonesia pada umumnya memiliki banyak pengertian. Berbagai lembaga pemerintah menggunakan definisi industri kecil yang berbeda-beda. Definisi yang paling sering digunakan adalah definisi dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menggunakan jumlah pekerja sebagai kriteria untuk membedakan antara berbagai kategori industri. Menurut definisi BPS, suatu industri dapat digolongkan sebagai industri kecil diukur dengan menggunakan ukuran jumlah tenaga kerja yaitu sebanyak 5-19 orang.

Ukuran ini sama dengan kriteria dari John Naibitt yang dikutip oleh Jusuf Irianto (1996:13), menyebutkan bahwa suatu industri dikatakan kecil apabila karyawannya berjumlah dibawah 20 orang. Sedangkan untuk industri rumah tangga, BPS menetapkan jumlah pekerjanya tidak lebih dari 5 orang.

---

<sup>34</sup> [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id) (diakses tanggal 10 Oktober 2014)

Departemen perdagangan lebih menitik beratkan pada aspek permodalan, bahwa suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila permodalannya kurang dr Rp 25 Juta, dan Departemen perindustrian melalui SK Menteri Perindustrian No 13/M/SK-1/1990 menjelaskan bahwa kriteria bidang usaha industri kecil adalah industri dengan nilai asset tidak lebih dari Rp 600 juta, tidak termasuk nilai tanah dan rumah yang ditempati dan dimiliki warga negara Indonesia.

Selain BPS dan Departemen Perindustrian, instansi pemerintah lainnya menetapkan standar tertentu untuk mendefinisikan industri kecil. BI (Bank Indonesia) misalnya menggolongkan industri/pengusaha kecil berdasarkan kriteria omzet usahanya tidak lebih dari 2 Milyar dari kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan). Sedangkan KADIN mendefinisikan industri kecil sebagai sektor usaha yang memiliki asset minimal Rp 250 Juta, tenaga kerja paling banyak 300 Orang dan nilai penjualannya dibawah Rp 100 juta.

Menurut UU No. 9/1995 tentang usaha kecil adalah sebagai berikut :

Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 Milyar. Ketiga, milik Warga Negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Kelima, berbentuk badan usaha orang perseorangan, tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum, termasuk koperasi.

Industri kecil adalah badan usaha yang menjalankan proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil. Apabila dilihat dari sifat dan bentuknya, maka industri kecil bercirikan :

1. Berbasis pada sumber daya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian.
2. Dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal sehingga mampu mengembangkan sumber daya manusia.
3. Menerapkan teknologi lokal (*indigenous technology*) sehingga dapat dilaksanakan dan dikembangkan oleh tenaga local.
4. Tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan pembangunan yang efektif (Haeruman, 2001)

Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud Usaha kecil adalah suatu usaha yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta yang tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang aset yang dimiliki tidak melebihi nilai Rp 600 juta (Bank Indonesia: 1993)

Pengertian industri kecil pada tiap-tiap negara tidak sama, terutama mengenai penggunaan tenaga kerja dan modal yang digunakan. Sebagai gambaran, jumlah tenaga kerja maksimum yang digunakan industri kecil di AS, Jepang, Korea Selatan dan Philipina masing-masing 1000 orang, 300 orang, 200 orang dan 100 orang (Rahardjo,1984:160)

Ciri-ciri industri kecil yang lengkap dapat dilihat dari surat keputusan menteri menteri perindustrian, yaitu :

1. Investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan Rp 70 juta kebawah.
2. Investasi tenaga kerja Rp 625 juta kebawah.
3. Pemilik usaha adalah warga negara Indonesia.

Pembagian industri kecil berdasarkan keterampilan tradisional, seni dan penggunaan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut :

1. Industri yang mempunyai kaitannya dengan industri menengah dan besar.
2. Industri kecil yang berdiri sendiri.
3. Industri yang mempunyai pasar lokal.

Adapun UU yang mengatur industri kecil di Indonesia, UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian menyebutkan bahwa (1) Pemerintah menetapkan bidang usaha industri yang masuk ke dalam kelompok industri kecil yang dapat diusahakan hanya oleh WNI dan (2) Pemerintah menetapkan jenis industri yang khusus dicadangkan bagi kegiatan industri yang dijalankan oleh masyarakat pengusaha dari golongan lemah.

UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha industri kecil memberikan dasar hukum bagi pemberian fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha dan pengadaan barang dan jasa untuk usaha industri kecil.

Cabang-cabang industri dalam lingkup kelompok industri kecil yaitu :

1. Cabang industri Makanan dan Minuman;
2. Cabang industri Sandang dan Pangan;
3. Cabang industri Kerajinan Umum;
4. Cabang industri Kimia dan Bahan Bangunan;

#### 5. Cabang industri Logam.

Menurut hasil studi Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, menunjukkan bahwa di Indonesia kriteria UKM sangat berbeda-beda, tergantung pada fokus permasalahan yang dituju dan instansi yang berkaitan dengan sektor ini. Secara umum sektor UKM memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak *up to date*, sehingga sulit untuk menilai kinerja usahanya;
2. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi;
3. Modal terbatas
4. Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas;
5. Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang;
6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas;
7. Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti. Sistem administrasi standar dan harus transparan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dalam memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan seperti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Usaha kecil yang dimaksud disini meliputi juga usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Adapun usaha kecil informal adalah berbagai usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun, dan berkaitan dengan seni dan budaya. Walaupun usaha kecil menengah digolongkan pada suatu usaha yang berskala kecil, tapi sektor usaha kecil dan menengah merupakan suatu jenis usaha yang mampu memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 56 persen. Selain itu usaha kecil menengah juga merupakan suatu sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini cukup terlihat dari data yang dipublikasikan oleh kementerian Negara Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa tenaga kerja yang bekerja pada sektor ukm mencapai 96 persen (2000-2006) relatif terhadap total tenaga kerja yang tersebar di sembilan sektor ekonomi Indonesia (Elvira Tjandrawinata, 2007)

Selain itu jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) terhadap jumlah badan usaha di Indonesia juga sangat besar, yaitu 99 persen. Namun berdasarkan data tahun 2006, pertumbuhan sektor ukm mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana tingkat pertumbuhan

sektor UKM pada tahun 2006 hanya mampu mencapai sebesar 3,88 persen, sedangkan tingkat pertumbuhan pada usaha besar masih mampu mencapai 5,7 persen.

### **I.5.3.2 Jenis kegiatan Industri Kecil dan Menengah**

Dikutip dari Jusuf Irianto (1996;13), Steinhoff (1978) mengidentifikasi sedikitnya ada lima bidang kegiatan industri kecil yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Pabrik (*Manufacturing*)
- Pertambangan (*Mining*)
- Perkulakan grosir (*Wholeselling*)
- Perdagangan Eceran (*Retailing*)
- Jasa Pelayanan (*Service*)

#### **1. Pabrik (*Manufacturing*)**

Industri kecil dengan bidang kegiatan pabrik industri ini umumnya menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen misalnya cangkul yang dimanfaatkan oleh petani, alat-alat pertukangan kayu, industri kerajinan, dan sebagainya. Selain itu mereka juga mendukung kegiatan industri besar dengan membuat produk yang dapat dimanfaatkan untuk melengkapi hasil produksi industri besar, misalnya komponen-komponen untuk sepeda, kendaraan bermotor atau mobil dan sebagainya.

## 2. Pertambangan (*Mining*)

Pertambangan yang dimaksud dalam industri kecil bukan jenis pertambangan berat seperti Pertamina, melainkan industri kecil yang memanfaatkan bahan-bahan mentah yang berasal dari perut bumi (*the bowls of earth*) untuk dijual langsung kepada konsumen sebagai kegiatan utamanya atau dijual ke perusahaan besar yang akan mengolah kembali hasil produksinya, misalnya para penambang garam dan penambang pasir.

## 3. Perkulakan Grosir (*Wholeselling*)

Pengusaha kecil yang bergerak di bidang perkulakan ini biasanya disebut sebagai pedagang perantara, mereka berada di antara pengusaha industri besar yang memproduksi barang dengan pengusaha kecil yang menjual secara eceran produk pengusaha besar. Peranan pedagang grosir sangat penting sebagai saluran utama distribusi hasil produksi kepada konsumen, karena dapat mengurangi biaya distribusi barang (*the cost distribution are gratly reduced*).

## 4. Pedagang Eceran (*Retailing*)

Bidang kegiatan ini merupakan presentase terbesar dari semua industri kecil. Mereka dapat dijumpai pada setiap perdagangan berbagai macam barang dan jasa sebagaimana yang ada di bayangan, pengusaha eceran membeli barang dagangannya dari pedagang perantara (*wholesalers*), pemborong (*jobbers*) atau para penyalur utama (*main distributors*). Pedagang eceran tersebar dimana-mana dan dapat dijangkau oleh konsumen dimanapun berada.

## 5. Jasa Pelayanan (*Service*)

Karakteristik utama dari perusahaan jasa pelayanan adalah tidak menghasilkan barang yang dikonsumsi, namun memberi pelayanan yang sifatnya non material dan tentunya menerima imbalan dari si pemakai jasa pelayanan.

Dalam kaitannya dengan industri pelayanan jasa (*service industries*). Broom dan Longenecker (1979) yang dikutip oleh Jusuf Irianto (1996:15) mengklasifikasikan industri pelayanan jasa dalam bentuk 5 kegiatan sebagai berikut :

- a) Jasa Pelayanan Usaha (*Business Service*)
- b) Jasa Pelayanan Pada Perorangan (*Personal Service*)
- c) Jasa Pelayanan Reparasi (*Repair Service*)
- d) Hiburan dan Dekorasi (*Entertainment and Recreation Service*)
- e) Hotel dan Motel<sup>35</sup>

### I.5.3.3 Tingkat Permodalan Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil menengah merupakan suatu jenis usaha yang sanagtlah minim akan tingkat permodalan yang dimiliki, dimana dalam UU UKM dijelaskan bahwa kategori usaha kecil berkisar Rp 50 juta- Rp 500 juta dan usaha menengah Rp 599 juta – Rp 10 Milyar, dimana aset tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan tingkat penjualan tahunan bagi usaha kecil Rp 300 juta – Rp 2,5 Milyar dan usaha menengah Rp 2,5 milyar – Rp 50 Milyar. Hal ini cukup terlihat bahwa tingkat permodalan yang dimiliki usaha kecil memanglah

<sup>35</sup> Jusuf Irianto. 1996 . Industri Kecil Dalam Perspektif Pembinaan dan Pengembangan : Cetakan Pertama. Surabaya : UA Press. Hal 13-17

sangat terbatas, bila dibandingkan dengan jenis-jenis usaha lain yang memiliki tingkat cakupan skala usaha yang cukup luas.

#### **I.5.4 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah**

Dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2005 ditetapkan kewenangan pemerintah di bidang perkoperasian bertujuan untuk memfasilitasi sistem distribusi bagi pengusaha kecil dan menengah serta memfasilitasi kerjasama bagi pengusaha kecil dengan badan usaha lain.<sup>36</sup>

Dilihat dari pengertian pemberdayaan, maka pemberdayaan Usaha kecil (UKM) dan Menengah adalah upaya untuk meningkatkan produktivitas potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh Usaha kecil dan Menengah (UKM) itu sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya Usaha kecil dan menengah (UKM) yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) yang demikian dapat diharapkan memberi peranan kepada individu sebagai objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Untuk meningkatkan produktifitas yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maka perlu adanya prinsip pemberdayaan usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha kecil dan menengah untuk berjarya dengan prakarsa sendiri.

---

<sup>36</sup> [www.repositoru.usu.ac.id](http://www.repositoru.usu.ac.id)(diakses (8 Oktober 2014)

- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha kecil dan menengah.
- d. Peningkatan daya saing usaha kecil dan menengah.
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.<sup>37</sup>

Proses pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah sebagai suatu kebijakan yang harus tetap direalisasikan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintah maupun nonpemerintah telah menyelesaikan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tersebut, pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

### **I.5.5 Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kerajinan Tangan (Handycraft)**

Pembangunan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, pada hakikatnya dapat diartikan

---

<sup>37</sup> [www.repositoru.usu.ac.id](http://www.repositoru.usu.ac.id)

bahwa pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat dilihat dari berbagai program pengembangan pemberdayaan masyarakat salah satunya dalam model pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).<sup>38</sup>

Secara konseptual pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah, pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai pelaku maupun stake holder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan usaha kecil dan menengah (UKM) baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya.

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah itu sendiri dapat diklasifikasikan dalam berbagai jenis usaha yaitu :

---

<sup>38</sup> <http://bapemas.jatimprov.go.id>

- Usaha kecil

Merupakan upaya pemberdayaan dalam peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat dunia, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia melalui bantuan modal, dan pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan modal dan kemudahan kredit dalam mengembangkan program kemitraan dengan pembinaan dan pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan.

- Usaha Menengah

Merupakan usaha yang memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan audit auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan serta memiliki segala persyaratan legalitas antar lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll, serta memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Pemberdayaan Usaha kecil dan Menengah disesuaikan dengan permasalahan yang sesuai di kawasan industri kecil dan menengah. Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat bottom up ternyata partisipasi UKM untuk pemberdayaan akan berhasil memberikan dampak perkembangan bagi perekonomian wilayah. Adapun praktek pemberdayaan UKM untuk

memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi suatu wilayah adalah sebagai berikut :

- a. **Identifikasi potensi**, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik sumber daya manusia, usaha kecil dan menengah dan lingkungan internalnya. Baik lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya alam khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal usaha kecil dan menengah. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayah masing-masing. Dalam identifikasi ini melibatkan stakeholder usaha kecil dan menengah dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait.<sup>39</sup>
- b. **Analisis kebutuhan**, dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki suatu wilayah yang dapat dilihat dari Sumber daya Alam, Sumber Daya Manusia, serta proses yang dilakukan untuk menjadikan potensi yang dimiliki tersebut menjadi suatu barang produksi.
- c. **Rencana kerja bersama**, setelah kebutuhan dapat ditentukan maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini baik perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait sebagai fasilitator.
- d. **Pelaksanaan Program Kerja Bersama**, jika program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja.

---

<sup>39</sup> [www.bapemas.jatimprov.go.id](http://www.bapemas.jatimprov.go.id)

Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan perguruan tinggi/LSM swasta dapat bertindak selaku pemberi konsultasi.

- e. **Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan**, berfungsi tidak saja untuk mengetahui hasil pelaksanaan program kerja bersama apakah yang dikerjakan sudah sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan bersama, namun juga untuk membuat penyesuaian jika diperlukan dengan perubahan lingkungan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kerajinan Tangan Handycraft merupakan lokasi kawasan industri kecil dan menengah yang digunakan sebagai aktifitas pengkajian, analisis dan pusat pembelajaran kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.<sup>40</sup>

Pemberdayaan kerajinan tangan bisa meliputi pemodalan bagi para pengusaha kecil yang ada supaya bisa mengembangkan usahanya dalam memperbaiki kondisi ekonominya, memberikan ilmu tentang management industri supaya bisa mengatur usahanya dengan baik khususnya pada pembukuan dari usahanya. Memberikan pelajaran tentang membaca kondisi pasar dengan cara membekali dengan kreatifitas pembuatan kerajinan tangan dengan beraneka jenis ragam seperti tas, dompet, brass, dll supaya bisa bersaing serta memberikan pembelajaran meliputi strategi pemasaran yang baik supaya para pelaku Usaha

---

<sup>40</sup> [www.bapemas.jatimprov.go.id](http://www.bapemas.jatimprov.go.id)

Kecil dan Menengah (UKM) kerajinan tangan mempunyai bekal yang cukup untuk menekuni usahanya.

Karena jika dilihat dari aspek ekonominya usaha kerajinan tangan sangat banyak menguntungkan karena untuk peluang pasar juga sangat terbuka, hal ini dikarenakan kerajinan tangan merupakan fashion yang sering dipakai khususnya kaum wanita. Sehingga permintaan pemesanan stabil dan mengalami kenaikan, dan jika dilihat dari aspek industri kerajinan tangan juga mempunyai dampak yang positif, karena industri ini bisa memberikan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar.

Dilihat dari fenomena diatas pengembangan UKM kerajinan tangan ini sangat layak dan harus dikembangkan guna menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang ada pada daerah-daerah khususnya pada kampung Kerajinan tangan yang berada di daerah Kelurahan Wonorejo kecamatan Tegalsari kota Surabaya yang kemudian hasil dari pemberdayaan diharapkan berdampak pada masyarakat serta dalam misi meningkatkan perekonomian pada pengrajin Usaha Kecil Dan Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft).

## **1.6 Definisi Konsep**

Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kebijakan publik**

Kebijakan publik adalah segala tindakan atau ketidak bertindakan pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

## 2. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk mendapatkan daya, kekuatan dan kemampuan dan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya serta dalam upaya pengembangan potensi diri yang dimiliki dengan memanfaatkan potensi yang ada.

## 3. Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Usaha kecil dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang-undang.

## 4. UKM Kerajinan Tangan (handycraft)

UKM kerajinan tangan (Handycraft) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung yang berfokus pada kerajinan tangan (Handycraft).

## 5. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah upaya yang dilakukan untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan perencanaan yang lebih diutamakan untuk menjawab kebutuhan UKM yang dilakukan secara partisipatif dengan melakukan identifikasi potensi, analisis kebutuhan, rencana kerja bersama, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena dimaksudkan untuk menggambarkan kebijakan Disperindag dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari kota surabaya.

### **1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti akan membatasi diri dalam penelitian ini, pada meneliti gambaran dari kebijakan disperindag dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di wilayah kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari kota surabaya.

### **1.7.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini ditetapkan secara purposive di wilayah Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari kota Surabaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dengan pertimbangan karena terdapat pemberdayaan Usaha Kecil Menengah terhadap para pengusaha kerajinan tangan Handycraft yang terdapat di lokasi penelitian yang ditentukan, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. karena pihak yang melakukan pemberdayaan terhadap pelaku UKM Kerajinan Tangan tersebut adalah Disperindag Kota Surabaya.

### **1.7.4 Teknik Penentuan Informan**

Dalam penelitian tentang kebijakan Disperindag dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di wilayah kclurahan wonorejo dan kecamatan tegalsari kota Surabaya, peneliti menggunakan teknik penentuan informan metode purposive. Peneliti menggunakan cara ini karena peneliti telah memiliki informan

yang memiliki informasi tentang objek penelitian serta mengetahui pihak-pihak mana saja yang dinilai memiliki informasi yang memadai tentang objek penelitian ini, sehingga bisa digali informasi darinya melalui observasi maupun wawancara secara mendalam. Dalam pemilihan informan, Spardley mengajukan beberapa kriteria, antara lain :

1. Mereka yang cukup lama dan intensif”menyatu” dengan suatu kegiatan atau “medan aktifitas” yang menjadi sasaran perhatian dan penelitian. Subyek tidak hanya sekedar memberi informasi, tetapi juga telah menghayati secara sungguh sabagai akibat dari keterlibatannya yang telah cukup lama pada lingkungan yang bersangkutan. Hal ini di tandai dengan kemampuan memberikan informasi yang “diluar kepala”tentang suatu yang ditanyakan.
2. Mereka yang masih terlibat secara penuh/ aktif pada lingkungan/ kegiatan yang menjadi sasaran/ perhatian penelitian.
3. Mereka yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk di mintai informasi.
4. Mereka yang dalam memberikan informasi tidak cenderung”diolah” atau “dikemas: terlebih dahulu. Persyaratan ini cukup penting terutama bagi peneliti pemula yang biasanya masih cukup sukar mengatasi informan yang cenderung menegmas informasi dengan bias pribadinya. Persyaratan ini berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan informasi yang lebih deskriptif/ faktual.

5. Mereka yang sebelumnya tergolong masih “asing” dengan peneliti, sehingga peneliti dapat merasa lebih tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subyek yang semacam guru baru bagi dirinya. Dalam banyak pengalaman, persyaratn ini terbukti merupakan faktor yang cukup penting bagi produktifitas perolehan informasi dilapangan.<sup>41</sup>

Sehingga Peneliti memilih informan yang akan memberikan data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Ibu Uli selaku Kepala Bagian Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
2. Bapak Nardi selaku Ketua Pengembangan Kampung Binaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
3. Mbak Rizki selaku Pendamping UKM Kerajinan Tangan Handycraft di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.
4. Pak Sa`ban selaku Kepala Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
5. Mbak Silvi selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
6. Mas Didit selaku Staff Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya.
7. Bu Sri Sulatiningsih selaku Ketua Kelompok Pelaku UKM Kerajinan Tangan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

---

<sup>41</sup> Faisal, Sanapiah.1990. Penelitian Kualitatif : Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: YA3 Malang. Hal 57-58

8. Bu Sutjiati selaku Ketua Kelompok Pelaku UKM Kerajinan Tangan di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.

### **1.7.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, untuk pengumpulan data penulis akan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (*indepth interview*) baik dari sumber primer maupun sekunder yang dapat berupa instansi instansi terkait yang berwenang dan berhubungan dengan topik dalam penelitian ini serta tokoh-tokoh masyarakat di daerah tempat penelitian akan berlangsung. Penulis juga tidak menutup kemungkinan akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi.

### **1.7.6 Teknik Analisa Data**

Analisa data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Pada penelitian ini, peneliti akan mencari dan menganalisis gambaran kebijakan Disperindag dalam pemberdayaan usaha kecil menengah di wilayah kelurahan wonorejo kecamatan tegalsari kota surabaya dan menggambarkan hubungannya dengan peningkatan kualitas produk UKM di wilayah kecamatan Tegalsari. Peneliti akan menganalisis data-data dari instansi yang bersangkutan, wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dan data-data dari media, karena itu penelitian akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Untuk memperoleh data yang kredibel dan teratur maka dilakukan melalui 3 kegiatan yang saling berkaitan, yaitu :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi dapat diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting sehingga ada penyederhanaan data dan proses ini dilakukan terus menerus selama penelitian berlangsung. Proses mereduksi data yang dilakukan peneliti dalam hal ini mengelompokkan hasil wawancara dalam format table menurut nama informan dan pelaksanaan wawancara berdasar pedoman wawancara yang digunakan. Setelah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk transkrip wawancara.

### 2. Penyajian Data

Yaitu merupakan sekumpulan informan yang telah tersusun secara terpadu dan mudah dipahami yang memberi kemungkinan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada proses ini peneliti mentransformasikan data kasar menjadi bentuk uraian.

### 3. Verifikasi

Yaitu merupakan sebagian dari seluruh konfigurasi kegiatan penelitian yang utuh dan dapat dilakukan selama penelitian berlangsung.

Kesimpulan ini mungkin dapat dilakukan sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran peneliti selama ia menulias, meninjau ulang catatan lapangan, atau mungkin lebih seksama dan memakan waktu yang lebih besar, untuk menggambarkan hubungan kebijakan Disperindag

dalam memberdayakan usaha kecil menengah di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.<sup>42</sup>

### **I.7.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber metode, penyidik dan teori.

#### 1) Triangulasi dengan sumber

Menurut Patton, triangulasi dengan sumber adalah membanding dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a) Membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
- b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d) Membandingkan keadaan yang perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

---

<sup>42</sup> Mathew, J.Miles, dan A.Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Baru. Jakarta: UI Press. Hal.15-20

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

e) Membandingkan dengan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## 2) Triangulasi dengan metode

Menurut Patton, terdapat dua strategi, yaitu :

- a) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- b) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## 3) Triangulasi dengan peneliti

Memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

## 4) Triangulasi dengan teori

Menurut Patton, triangulasi dengan teori dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakan penjelasan banding.

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan ketujuhbelas(Bandung,2002), hal.178-179.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Untuk Pelaku Usaha Kecil Menengah

Nama :

- 1) Jenis pekerjaan apa yang sedang ditekuni oleh anda?
- 2) Berapa lama anda menekuni pekerjaan tersebut?
- 3) Berapa jumlah pekerja yang anda miliki?
- 4) Peralatan apa saja yang digunakan untuk menunjang pekerjaan tersebut?
- 5) Apakah usaha anda sudah mendapat ijin usaha?
- 6) Berasal dari manakah modal awal anda untuk membikin usaha tersebut?
- 7) Berapa hasil penjualan yang dihasilkan dalam satu tahun?
- 8) Apakah usaha anda pernah mendapat pemberdayaan/bantuan seperti modal, pembinaan, pelatihan atau modal kredit usaha?
- 9) Siapa aja yang pernah melakukan/memberi pemberdayaan tersebut?
- 10) Apakah anda tahu mengenai kebijakan pemberdayaan yang sudah diberikan pemerintah untuk pelaku Usaha Kecil Menengah?
- 11) Kebijakan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam memberdayakan ukm tersebut?
- 12) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pemberdayaan tersebut?
- 13) Apakah manfaat dari adanya bantuan pemberdayaan tersebut?

### B. Fokus Kebijakan Publik

- 1) Bagaimanakah fenomena Usaha Kecil Menengah Kerajinan Tangan (Handycraft) di Wilayah kecamatan Tegalsari Kota Surabaya?
- 2) Bagaimanakah respon Disperindag terhadap fenomena UKM tersebut?
- 3) Apa saja formula dari Disperindag dari kebijakan yang sudah diberikan?
- 4) Bagaimanakah implementasi dari kebijakan tersebut?
- 5) Bagaimanakah upaya-upaya yang diberikan Disperindag dalam menindaklanjuti pengembangan UKM tersebut ?

### C. Fokus Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

- 1) Apa itu Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah?
- 2) Mengapa ada pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dari Pemerintah?

- 3) Bagaimanakah proses dari Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah?
- 4) Siapa sajakah aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan Usaha kecil Menengah?
- 5) Bagaimanakah Hasilnya dari pemberdayaan tersebut bagi pelaku Usaha Kecil Menengah?
- 6) Bagaimanakah tindak lanjut dari Disperindag untuk keberlanjutan pemberdayaan yang sudah diberikan?

